

## ABSTRAK

### Negosiasi Identitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Mengkomunikasikan Gagasan Alternatifnya kepada Kelompok Mayoritas

---

Jika masing-masing elemen bangsa (kelompok kebudayaan) melihat kepentingan golongan atau pribadinya sendiri, maka Indonesia akan mengalami disintegrasi sosial yang berujung pada keruntuhan bangsa dan negara (Moesa, 2007: 231). HTI muncul dengan gagasan alternatif yang beranggapan tujuan ideal kehidupan terkait erat dengan religiositas di berbagai aspek. Tujuan HTI adalah mengembalikan kehidupan berbasis hukum-hukum *syara'* dengan khilafah sebagai institusi yang menaungi dan khalifah sebagai pemimpin peradaban. Serta merta historisitas mengenai kejayaan masa kekhilafahan terdahulu menjadi kiblat optimisme HTI mencapai tujuannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara HTI mengkomunikasikan gagasan alternatifnya kepada kelompok masyarakat mayoritas yang memiliki gagasan dominan mengenai konsep kebangsaan dan kenegaraan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang berupaya menjelaskan proses pengalaman aktivis dakwah HTI dalam mengkomunikasikan gagasan alternatifnya kepada anggota kelompok mayoritas. Penelitian ini didukung dengan Teori Negosiasi Identitas dari Stella Ting-Toomey dan Teori Kelompok Pendamping (*Co-Cultural Theory*) dari Mark Orbe. Selain itu, terdapat penambahan konsep mengenai identitas dan pembentukan persepsi. Informan dalam penelitian ini adalah aktivis dakwah HTI yang memiliki status struktural yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi komunikasi yang dilakukan para aktivis HTI kepada kelompok mayoritas terhadap gagasan alternatif HTI merupakan bentuk negosiasi identitas kultural yang dipengaruhi oleh tujuan separasi dalam berkomunikasi. Secara spesifik aksi separasi yang dilakukan HTI meliputi sifat tegas (*assertive*), agresif (*aggressive*), dan ketidaktegasan (*nonassertive*). Interaksi komunikasi negosiasi identitas dengan tujuan tersebut dilakukan para aktivis dilandasi oleh pengetahuan (*knowledge*), kecakapan (*skill*), dan kesadaran (*mindfulness*) terhadap identitas kebudayaan HTI yang diperoleh sejak menjadi murid (*daris/ darisah*) HTI. Ketiga komponen negosiasi identitas tersebut digunakan oleh para aktivis untuk pembentukan persepsi baru anggota kelompok mayoritas.

Kata kunci : HTI, Gagasan, Negosiasi Identitas

## PENDAHULUAN

HTI berpandangan bahwa nasionalisme sebagai bentuk fanatisme kebangsaan yang merupakan bagian dari bentuk *ashabiyah*. Berdasarkan sabda Rasulullah

shallahu'alaihi wa salam (SAW), “*Bukan dari golongan kami, orang yang menyeru kepada ashabiyah*” (HR Abu Dawud). Kemudian, kata *ashabiyah* dimaknai oleh HTI adalah ajakan untuk membela orang atau kelompok, tanpa melihat apakah orang atau kelompok tersebut benar atau salah; juga bukan untuk membela Islam, atau menjunjung tinggi kalimat Allah, melainkan karena dorongan marah dan hawa nafsu.

Upacara bendera atau menjadi pembina upacara menurut HTI merupakan contoh praktis dari *ashabiyah*. Sebab, upacara bendera yang dilaksanakan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam saat ini adalah sarana atau jalan untuk menyerukan dan menanamkan paham nasionalisme. Berlandaskan pemikiran yang dipahami sebagai kebenaran hakiki tersebut, HTI mengharamkan setiap orang menganut nasionalisme.

Sebagaimana disebutkan dalam berita tersebut, bahwasanya Shiddiq Al Jawi telah menyitir hadist riwayat Abu Dawud untuk mendasari argumentasinya itu. Shiddiq Al Jawi juga mengutip pendapat pendiri Hizbut Tahrir (HT), Taqiyuddin an-Nabhani yang mengatakan bahwa nasionalisme berasal dari negara kafir penjajah. Menurut Taqiyuddin, sebagaimana dikutip dari portal berita Islam Toleran, bahwa Islam tidak pernah mengajarkan dan membenarkan paham nasionalisme. Paham nasionalisme sebenarnya berasal dari negara-negara kafir penjajah. HT menganggap paham ini sengaja dihembuskan ke negara-negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam untuk memecah belah kaum muslimin yang sebelumnya bersatu dalam satu kekhilafahan—khilafah yaitu sistem kepemimpinan umat bagi seluruh kaum muslimin di dunia.

Tidak hanya memberi stigma pada nasionalisme, aktivis yang berdiri di belakang bendera ormas Islam ini (HTI) juga mengharamkan demokrasi. Artikel elektronik yang dilansir VOA Islam ([voa-islam.com](http://voa-islam.com)), memuat khotbah Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto kepada sejumlah wartawan dalam dialog dengan tajuk “Mengenal Lebih Dekat: Konsep, Pemikiran dan Gerak HTI” di Hotel Borobudur, Jakarta pada 25 Mei 2013 (Desastian, 2013).

Ismail Yusanto atas nama HTI menyerukan agar umat Islam berhenti mendukung demokrasi. Ismail memberikan pengertian bahwa negara Indonesia bukan negara demokrasi, bahkan dalam konstitusi, HTI memiliki pemahaman bahwa Indonesia tidak menyebut kedaulatannya sebagai negara demokrasi. Termasuk dalam Pancasila juga tidak disebutkan. Menurut HTI demokrasi adalah sistem yang tiba-tiba muncul begitu saja dalam pemerintahan. Lebih jauh Ismail Yusanto menyampaikan, demokrasi bukan berasal dari Islam. Sistem yang benar adalah menegakkan syariah dan khilafah. Oleh sebab itu, HTI ingin menebarkan ketidakpercayaan pada demokrasi.

Berdasarkan pada hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2006 HTI memiliki dukungan 3,3 persen. Sedangkan Nahdatul Ulama (NU) 71,7 persen, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 59,1 persen, Muhammadiyah 54,1 persen, Front Pembela Islam (FPI) 16,9 persen, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) 11 persen (Burhanudin, 2012: 3). HTI sebagai kelompok kebudayaan minoritas menganggap haram nasionalisme dan demokrasi untuk mencapai reformasi impiannya. HTI menyebarkan ajaran Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia dengan disisipi gerakan perjuangan menegakkan khilafah.

Khilafah dinilai sebagai solusi segala persoalan sistem pemerintahan dan aspek kehidupan yang menurut HTI carut-marut. Tujuan HTI adalah mengajak kaum muslimin Indonesia kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang.

HT bertekad untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti berabad silam, menjadi negara nomor satu di dunia. Itu menjadi tujuan utama. Karenanya HTI mengkonstruksi pemikiran umat Islam Indonesia agar dapat mengambil alih kendali negeri ini dari gagasan dominan (yaitu nasionalisme dan demokrasi). Kegiatan kehidupan diharapkan diatur dengan hukum-hukum *syara'*—yaitu seruan Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba-Nya—terkait dengan pandangan hidup halal dan haram untuk dilakukan setiap manusia.

Sebagai satu paham, demokrasi bersumber pada prinsip kebebasan individu (individualisme) yang tumbuh dan hidup subur di negara-negara Barat—yang notabene bercitra negara kafir (penjajah) menurut HTI—sejak abad ke-17 yang lalu, diakui memang memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Menurut Zulfikri Suleman dalam bukunya “Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta”, ini berarti, demokrasi belum tentu efektif apabila diterapkan untuk bangsa-bangsa non-Barat seperti Indonesia yang pada dasarnya berprinsip kekeluargaan atau kebersamaan (2010: 3).

Meski pelaksanaan demokrasi di Indonesia masihlah rawan dan masih banyak pelanggaran sistem demokrasi oleh partai-partai politik yang belum stabil, Hadiwinata dan Schuck berpendapat bahwa jika ekstrimisme agama tumbuh, rakyat akan menjadi makin sektarian dan primodialistis, adu kekuatan dan kekerasan akan mengemuka dan ini akan berarti akhir demokrasi Indonesia (Hadiwinata dan Schuck, 2010: 240).

Sebuah status dalam akun twitter Muhamad Ali (@muhali74) yang beridentitas seorang asisten profesor kajian Islam di Universitas California bersuara mengungkapkan keheranannya mengenai pemikiran HTI yang mengandung kontradiksi, yaitu HTI menolak nasionalisme dan demokrasi, tapi memakai atribut Indonesia dan hidup bebas di Indonesia (2014).

Kemudian ada pula, seruan provokasi “Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia karena Mengancam Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia” yang menjadi tajuk dari petisi yang termuat dalam situs [www.change.org](http://www.change.org) sehubungan dengan penolakan gagasan—refleksi visi dan misi—keislaman HTI dalam menilai haramnya nasionalisme sebagai bentuk terobosan penyelesaian setiap permasalahan (2012). Pada 2013 petisi tersebut mendapat 309 pendukung. Banyak dari para pendukung mengungkapkan kecintaannya terhadap Indonesia dan tidak rela Indonesia disetir oleh HTI yang merendahkan sejarah, atribut kebangsaan dan kenegaraan Indonesia.

Keberadaan HTI diberi label sebuah ancaman negara yang harus dihentikan dan bahkan dihancurkan sebelum menghancurkan NKRI (Widiani

Gede, 2013). Selain itu, ada juga pendapat yang datang dari Facebook fans page “Indonesia Hari Ini dalam Kata-Kata” bahwa proses transformasi dan perubahan dari NKRI menjadi negara khilafah di bumi nusantara pasti akan kacau, penuh dengan pergolakan, dan pertumpahan darah pasti terjadi (2013).

Gagasan alternatif HTI dengan seruan tegaknya khilafah—yang mengharamkan nasionalisme dan demokrasi—dan gagasan dominan masyarakat Indonesia yang memperjuangkan nasionalisme dan demokrasi, merupakan dua gagasan yang memiliki perbedaan fundamental.

## **RUMUSAN MASALAH**

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai kelompok minoritas yang membawa gagasan alternatif untuk meniadakan nasionalisme dan demokrasi yang selama ini dipegang masyarakat Indonesia sebagai landasan persatuan dan kesatuan negara. HTI menanamkan paham untuk menegakkan khilafah sebagai pengganti maklumatnya mengharamkan nasionalisme dan demokrasi.

Proses negosiasi identitas kebudayaan HTI dilakukan dengan menggunakan pola komunikasi tertentu. HTI membutuhkan tahapan penerimaan secara verbal maupun non-verbal agar gagasan HTI yang saat ini kontras dengan gagasan dominan masyarakat Indonesia lambat laun diakui, dibenarkan, diterima dan membudaya di Indonesia.

Pola komunikasi yang digunakan HTI adalah sebagai jalur pertemuan dua ideologi berbeda antara HTI dengan masyarakat Indonesia—di mana pada

penelitian ini fokus mewakili pada operasional HTI region Kota Semarang—yang dominan, yaitu pro nasionalisme dan demokrasi. Bahasa verbal dan non-verbal dalam komunikasi yang dijalin HTI tidak ubahnya dapat menjadi “senjata” dalam menginisiasikan gagasan alternatif HTI ke dalam pemikiran setiap individu yang menerima pesan atau informasi.

Orang-orang yang menerima gagasan alternatif HTI berpotensi dapat merubah identitasnya dari anggota kelompok mayoritas yang berpaham nasionalisme dan demokrasi menjadi anggota kelompok minoritas yang menolak paham nasionalisme dan demokrasi. Bagaimana HTI sebagai kelompok minoritas mengomunikasikan gagasan alternatifnya kepada kelompok mayoritas yang memiliki gagasan dominan yang meliputi nasionalisme dan demokrasi?

## **TUJUAN**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengkaji cara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengomunikasikan gagasan alternatifnya kepada anggota kelompok mayoritas yang memiliki gagasan dominan yang meliputi nasionalisme dan demokrasi untuk menjadi anggota atau partisipan pejuang generasi baru HTI.

## **KERANGKA TEORI**

### 1. Teori Negosiasi Identitas

Menurut Littlejohn dan Foss, bahwa identitas atau gambaran refleksi diri, dibentuk melalui negosiasi ketika kita menyatakan, memodifikasi, atau menantang identifikasi-identifikasi diri kita atau orang lain. Ketika berkomunikasi dalam kelompok kebudayaan yang sama, setiap individu akan mengalami pengalaman yang lebih dalam hal kerentanan, persamaan, kejelasan, keterikatan, dan konsistensi; tetapi ketika berinteraksi dengan

budaya lain, setiap individu dapat mengalami kebalikannya—ketidakrentanan, perbedaan, ketidakjelasan, otonomi, dan perubahan—mengarahkan pada kurang stabilnya dan bahkan kemungkinan akan transformasi (Littlejohn dan Foss, 2011: 132 - 133)

## 2. Teori Kebudayaan Pendamping

Dalam studi Orbe tentang teori kebudayaan pendamping (*co-cultural theory*), para informan ini disebut sebagai anggota kelompok yang tidak terwakili (*underrepresented group*) dan kebudayaan mereka adalah kebudayaan pendamping (*co-cultural*) (Gudykunst, 2005: 173). Dalam mendefinisikan komunikasi kelompok pendamping, sangatlah penting memperhatikan perspektif anggota kelompok *underrepresented* yang merasakan perbedaan sangat mencolok saat berinteraksi dengan anggota kelompok mayoritas (Gudykunst, 2005: 173-174).

## **METODOLOGI**

Fenomenologi transedental atau psikologis, menurut Moustakas, kurang berfokus pada penafsiran dari peneliti, namun lebih berfokus pada deskripsi tentang pengalaman dari para partisipan tersebut. Moustakas juga berfokus pada salah satu konsep dari Husserl, *epoche* (pengurangan), yang mana para peneliti menyingkirkan pengalaman mereka pribadi sejauh mungkin, untuk memperoleh perspektif yang segar (baru) terhadap fenomena yang sedang dipelajari. Sehingga dapat dipahami, bahwa transedental berarti segala sesuatunya dipahami secara segar (baru), seolah-olah untuk pertama kalinya (dalam Creswell, 2015: 110).

## **PEMBAHASAN**

Fase I (menjaga jarak) interaksi komunikasi yang berlangsung dengan anggota kelompok mayoritas bermotif separasi ketidaktegasan. Pada fase ini berlangsung dalam aktivitas sehari-hari. Fase II (pengenalan) penerapan dari sistem pembinaan

ke luar, bermotif separasi tegas yang menciptakan *knowledge*. Fase II dibagi menjadi subfase pengenalan general dan subfase pengenalan lanjutan (transisi). Keduanya dibedakan berdasarkan metodenya. Subfase pengenalan general menggunakan metode yang pengkajian aplikatif dalam bentuk komunikasi satu arah. Subfase pengenalan lanjutan (transisi) menggunakan metode pengkajian aplikatif dalam bentuk komunikasi dua arah. Fase III (penanaman dan transformasi) penerapan dari sistem pembinaan ke dalam, bermotif separasi agresif yang menciptakan *knowledge*, *mindfulness*, dan *skill* dengan metode *halaqah*. Pada fase ini individu dari kelompok mayoritas mengalami transformasi ideologi dan status sosial. Individu yang memiliki kompetensi dapat pula merangkap peran dalam fase ini, selain menjadi *daris/ darisah*, individu tersebut dapat menjadi musrif/ musrifah untuk individu yang lebih awam mengenai gagasan alternatif HTI (anggota kelompok mayoritas) darinya.

## **PENUTUP**

1. Komunikasi HTI sebagai kelompok *co-cultural* ini berorientasi tujuan separasi, yaitu menolak membentuk ikatan bersama dengan anggota kelompok dominan. Separasi ini memiliki spesifikasi sifat tegas (*assertive*), agresif (*aggressive*), dan ketidaktegasan (*nonassertive*). Perasaan dipahami (*the feeling of being understood*), perasaan dihormati (*the feeling of being respect*), dan perasaan diterima nilai perbedaannya (*the feeling of being affirmatively*) oleh anggota kelompok mayoritas merupakan tujuan psikologis kelompok minoritas. HTI memiliki struktur fungsional, sistem, dan metode

yang inheren untuk mencapai tujuan dan menjadi jalan komunikasi negosiasi identitas kultural HTI berlangsung di tengah-tengah kelompok mayoritas.

2. Secara berurutan proses komunikasi negosiasi identitas yang dilakukan kelompok minoritas HTI diidentifikasi terdiri dari tiga fase.
3. Kolaborasi Teori Negosiasi Identitas dengan Teori Kebudayaan Pendamping (*Co-Cultural Theory*) dapat memahamkan akademisi lebih dalam mengenai fenomena komunikasi kelompok minoritas di tengah kelompok mayoritas.
4. Secara praktis, memahami teori-teori, konsep, dan temuan penelitian mengenai negosiasi identitas ini dapat menjadi referensi individu dari suatu kelompok kebudayaan minoritas (*co-cultural*) untuk mengkomunikasikan gagasan alternatifnya kepada kelompok kebudayaan mayoritas. Selain itu, dapat memahamkan individu mengenai fenomena seseorang dari kelompok kebudayaan mayoritas menjadi negosiator identitas dari kelompok kebudayaan minoritas (*co-cultural*).
5. Jika, kedua belah pihak mampu mengkaji kembali stereotip negatif yang berkembang melalui interaksi komunikasi negosiasi identitas yang intensif dan berkontinyu, maka fenomena untuk menciptakan hubungan positif dan identitas baru dengan pemahaman baru niscaya akan mencapai realitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anam, Choirul Muhammad. (2015). *Cinta Indonesia Rindu Khilafah*. Semarang: Dakwah Media Publishing.
- Burhanudin, Jajat. (2012). *Ulama Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Creswell, John W.. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Ed. 3)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Denzin, Norman K. and Lincoln, Yvonna S.. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2005). *The Sage Handbook of Qualitative Research Third Edition*. California: Sage Publications Inc.
- DeVito, Joseph A.. (2011). *Komunikasi Antarmanusia (Edisi Kelima)*. Tangerang: Karisma Publishing Group.
- Gudykunst, William R.. (2005). *Theorizing about Intercultural Communication*. California: Sage Publication, Inc.
- Hadiwinata, Bob Sugeng, dan Schuck, Christoph. (2010). *Demokrasi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kimball, Charles. (2013). *Kala Agama Jadi Bencana*. Jakarta: Mizan Publika.
- Kuswarno, Engkus. (2009). *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Liliweri, Alo. (2001). *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Liliweri, Alo. (2002). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Littlejohn, Stephen W., dan Foss, Karen A.. (2011). *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moesa, Ali Maschan. (2007). *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.
- Moleong, Lexy J.. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKiS.
- Popper, Karl R.. (2002). *Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Turnomo. (2005). *Menghargai Perbedaan Kultural: Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samovar, Larry A., Porter, Richard E., dan McDaniel, Edwin R.. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Suleman, Zulfikri. (2010). *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

### **Jurnal**

- Mardiansyah, Reza Muhammad. (2013). Memahami Pengalaman Neosiasi Komunikasi Punk Muslim di dalam Masyarakat Dominan. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Murfia, Isti. (2014). Negosiasi Identitas Kultural Tionghoa Muslim dan Kelompok Etnisnya dalam Interaksi Antarbudaya. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Rachmawati, Puji Dwi. (2010). Negosiasi Identitas Masyarakat Keturunan Samin dengan Anggota Masyarakat Jawa Dominan di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kraden, Kabupaten Blora. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.